



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 400.10.2/58/CIVJ/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Nomor 141/1849/WN-SS/X/2025 tanggal lima belas oktober tahun dua ribu dua puluh lima perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja/APBNagari Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan Tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancanagan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi;
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua Bamus Nagari Sago Salido.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/58/CIVJ/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2025 yaitu :
- a Pendapatan sebesar Rp. 1.755.965.221,00 dengan rincian :

1 Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2 Pendapatan Transfer	Rp.	1.754.965.221,00
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.000.000,00

 - b Belanja sebesar Rp. 1.829.464.916,66
Dengan rincian :

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	800.907.120,62
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	499.654.000,00
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	57.500.000,00
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	64.675.866,04
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	166.100.130,00

 - c Pembiayaan Rp. 73.499.695,66 Sebesar :

1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	73.499.695,66
2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
2. Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam rencana kerja Pemerintah Nagari Sago Salido Tahun 2025 agar mencantumkan pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung program pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan prioritas penggunaan dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran pendapatan asli Nagari merupakan target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 1.203.139.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 508.890.814,00 sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 42.935.407,00 dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. Bagi hasil retribusi Daerah sebesar Rp. dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Anggaran pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.000.000,00,- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar 1.000.000,00,-.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2025, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari di bahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2025, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2025 serta adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

I BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA Antara Lain :

A Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :			
1	Peyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp	51.600.000,00
2	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp	284.100.000,00
3	Penyediaan Jaminan Soial bagi Kepala Desa dan Perangkat	Rp	16.952.652,00
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ADD	Rp	81.627.398,62
5	Penyediaan Tunjangan BPD (Bamus)	Rp	68.700.000,00
6	Penyediaan Operasional BPD	Rp	10.180.000,
7	Penyediaan Isentif/Operasional RT/RW (Honor petugas penjaga kantor dan Petugas CS/Kebersihan)	Rp	16.800.000,00
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Yang Bersumber Dari Dana Desa 3%)	Rp	36.094.170,00
B Sub Bidang Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :			
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Pajakn motor, Servis Motor dan Servis Komputer)	Rp	1.700.000,00
2	Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Gedung/Sarana Prasarana Kantor Desa yang bersumber dari 10% DD 2025	Rp	120.313.900,00
C Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil, Statsitik dan Kearsipan.			
1	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp	8.435.000,00
D Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :			
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp	10.060.000,00

2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non reguler)	Rp	18.600.000,00
3	Penyusunan dokumen Perencanaan Desa, Keuangan dan (RPJM/RKPDesa) Honor Tim Penyusun RKP, Verifikasi, PPHP,Dll	Rp	2.750.000,00
4	Penyusunan Dokumen Keuanagan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LKPJ/LPPN)	Rp	3.750.000,00
5	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp	45.044.000,00
E	Sub Bidang Pertanahan		
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	Rp	13.250.000,00
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Antara Lain :		
A	Sub Bidang Pendidikan :		
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Pembayaran Isentif Guru PAUD dan Pembayaran Penggantian Transfor Guru TPA).	Rp	217.800.000,00
B	Sub Bidang Kesehatan :		
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Penggantian Transfor Kader PPKBD dan SUB PPKBD)	Rp	4.800.000,00
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Kelas Bumil, lansia, Balita dan Isentif Kader Posyandu)	Rp	101.064.000,00
3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (Masyarakat, tenaga kader kesehatan dll) Rembuk Stunting	Rp	25.090.000,00
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp	11.837.500,00
5	Pembangunan/Rehabilitas sarana dan pra sarana Posyandu (Penambahan Kursi tamus posyandu)	Rp	6.000.000,00
C	Sub Bidang Kawasan Pemukiman :		
1	Pemeliharaan fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	Rp	24.000.000,00
D	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :		
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (BBGRM)	Rp	15.562.500,00
E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp	7.500.000,00
F	Sub Bidang Pariwisata :		
1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan	Rp	86.000.000,00

Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
(Pantai Sago).

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Antara Lain :

A Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :			
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI dan Hari Raya Keagamaan, dll). Kegiatan PHBI dan PHBN	Rp	35.000.000,00
B Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :			
1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Rp	10.000.000,00
C Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :			
1	Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	Rp	2.500.000,00
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMN	Rp	10.000.000,

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Antara Lain :

A Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :			
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp	14.225.866,04
B Sub Bidang Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga			
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp	45.680.000,00
C Sub Bidang Dukungan Pendanaan Modal			
1	Pelatihan Pengelolaan Bumhag dalam Pengelolaan Usaha Ketahanan Pangan	Rp	4.770.000,00

IV BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Antara Lain :

A Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Penanggulangan Tanggap Bencana	Rp	22.100.130,00
B Sub Bidang Keadaan Mendesak			
1	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD 2025)	Rp	144.000.000,00

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Sago Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.755.965.221,00.- dan Belanja sebesar Rp. 1.588.837.116,66.- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (167.128.104,34),- dan di Anggarkan Ketahanan Pangan untuk Belanja Modal BUMNAG sebesar Rp. 240.627.800,00, Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. Rp. 73.499.695,66,- dan pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Sago Salido.